



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BOYOLALI**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali Tahun 2020 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2019 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2020 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boyolali.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali Tahun 2020 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Boyolali yang lebih baik

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

KEPALA DP2KBP3A
KABUPATEN BOYOLALI



Dra. WIWIS TRISIWI HANDAYANI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660324 199202 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
Gambaran Organisasi	2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	3
Struktur Organisasi.....	4
Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
Rencana Strategis Organisasi.....	8
Perjanjian Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
Capaian Kinerja Organisasi.....	12
Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	33
Simpulan.....	33
Saran	33
DAFTAR LAMPIRAN	
A Struktur Organisasi dan Tata Kerja	
B Piagam Penghargaan	
c Rencana Strategis	
D Indikator Kinerja Utama	
E Rencana Kinerja Tahunan	
F Perjanjian Kinerja	
G Pengukuran Kinerja	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	10
Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1	14
Tabel 3.2 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 2	16
Tabel 3.3 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 3	18
Tabel 3.4 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 4	20
Tabel 3.5 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 5	21
Tabel 3.6 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 6	22
Tabel 3.7 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 7	26
Tabel 3.8 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 8	28
Tabel 3.9 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 9	29
Tabel 3.8 Alokasi dan Realisasi Anggaran	30

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented government***). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, **Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, **Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan** unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2020, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin)/Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.

2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali.
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021.

Gambaran Organisasi

Gambaran umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali (sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali, adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali mempunyai kedudukan yang sangat strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali bersama OPD terkait.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Penyusunan Perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan Perbup 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali terdiri dari :

a. Kepala.

b. Sekretaris

Dipimpin seorang Sekretaris, dengan 3 (tiga) Kepala sub Bagian yaitu : Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala sub Bagian Keuangan, dan Kepala sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan

Dipimpin seorang Kepala Bidang, dengan 2 (dua) Kepala Seksi yaitu : Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan dan Kepala Seksi Data dan Pengendalian Penduduk

d. Bidang Keluarga Berencana

Dipimpin seorang Kepala Bidang, dengan 2 (dua) Kepala Seksi yaitu : Kepala Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan dan Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.

e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dipimpin seorang Kepala Bidang, dengan 2 (dua) Kepala seksi yaitu : Kepala seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Kepala seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dipimpin seorang Kepala Bidang, dengan 3 (tiga) Kepala seksi yaitu : Kepala seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Kepala seksi Perlindungan Perempuan dan Keluarga dan Kepala seksi Pemenuhan Hak Anak

Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali diperoleh dengan mengakumulir isu organisasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2016 - 2021, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali yaitu :

1. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas;
2. menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian, ketahanan keluarga dan kualitas pelayanan;
3. meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
4. meningkatkan upaya – upaya promosi, perlindungan dan upaya mewujudkan hak – hak reproduksi;
5. meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program keluarga berencana;
6. mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia potensial, sejak pembuahan sampai dengan usia lanjut;
7. menyediakan data dan informasi keluarga;
8. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender disemua bidang

pembangunan;

9. meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga;
10. mewujudkan kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak;
11. mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak;
12. mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera;
13. meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pengambilan keputusan;
14. mewujudkan pengelolaan informasi gender, anak dan keluarga berencana yang akuntabel;
15. meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Semakin menurunnya kuantitas dan kualitas tenaga lapangan (Penyuluh Keluarga Berencana / PKB dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana / PLKB) sehingga sangat berpengaruh pada melemahnya jaringan penggerakan dan pelayanan Program KB dilini lapangan dari tingkat Kecamatan sampai Desa.
2. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang KB dan adanya kecenderungan Keluarga memiliki lebih dari 2 (dua) anak sehingga berpengaruh terhadap tingginya Total Fertility Rate (TFR) lebih dari 2,0 dan tidak tercapainya Pertumbuhan tanpa Pertambahan.
3. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beranggapan bahwa Pengarus Utamaan Gender (PUG) sebagai isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan.
4. Masih rendahnya Kualitas sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi advokasi, fasilitas, mediasi, koordinasi serta kapasitas SDM untuk menyusun perencanaan analisis dan manajemen PUG.

5. Masih rendahnya akses perempuan pada sumber daya ekonomi (modal, teknologi, informasi, pelatihan, penguatan jaringan / kelembagaan dll) menyebabkan sektor perekonomian yang dikelola perempuan tertinggal / belum mampu bersaing.
6. Masih tingginya tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Organisasi

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2021 mempunyai sasaran strategis :

1. Meningkatnya peran dan kesetaraan Gender.
2. Meningkatnya lingkungan ramah anak.
3. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan anak.
4. Meningkatnya kebijakan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program KB.
6. Meningkatnya kesertaan KB.
7. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai.
8. Tercapainya Kedewasaan Usia Perkawinan.
9. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga.

Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 28 indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2016 – 2021 secara lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra OPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan OPD.

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program

Rencana Kinerja Tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali 2016 - 2021 dengan penyesuaian yang diperlukan sesuai rancangan Renstra 2011 - 2015 karena Rencana Kinerja tahun 2019 disusun dalam masa peralihan antar Renstra terkait.

Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2020 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali 2020 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021 yang disesuaikan dengan rancangan Renstra 2016 - 2021 (masa peralihan) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019. Penyesuaian antara Rencana Strategis (Renstra) 2011-2015 yang disesuaikan dengan rancangan Renstra 2016 – 2021 dilakukan karena pada masa transisi ini dibutuhkan untuk menjawab perkembangan masyarakat yang semakin maju, namun dokumen RPJMD dan Renstra 2016 - 2021 masih dalam proses penyempurnaan. Oleh karena itu, terdapat sebagian indikator dalam Renstra 2011-2015 yang sudah tidak digunakan, digantikan dengan indikator baru yang diperkirakan akan digunakan dalam Renstra 2016 – 2021.

Perjanjian Kinerja meliputi 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak;
2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
3. Meningkatnya kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera melalui program keluarga berencana;
4. Meningkatnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja;
5. Meningkatnya layanan pengelolaan data dan informasi Program KB.

Berikut Perjanjian Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Boyolali Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Boyolali Tahun 2020 :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)

Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Perubahan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BOYOLALI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Bidang Pengampu
1	2	3	4	5
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Bagi Perempuan Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera	16%	K3
		Peningkatan Pemahaman tentang Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	15 Organisasi Wanita	PPPA
		Pemenuhan Hak Anak	28 Desa	PPPA
		Meningkatnya Penanganan Kasus Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	PPPA
		Peningkatan Kapasitas Jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak	58%	PPPA
		Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	55%	K3
		Meningkatnya Pemahaman Kesetaraan Gender, Perempuan dan Anak	1 Kegiatan	PPPA
		Meningkatnya Kualitas Tribina	21%	K3
		Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	3 Dokumen	DALDUK

		Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	1 Kegiatan	DALDUK
		Meningkatnya Pelayanan KB	77%	KB
		Pelayanan KB (Peran PPKBD)	100%	KB
		Pelayanan KB (Peran PPKBD)	100%	KB
		Cakupan Jumlah Kelompok KRR Yang Aktif	56,63%	K3
		Berkembangnya Kelompok PIK Remaja	13 Kelompok	K3
		Cakupan Pemahaman Perempuan dan Remaja tentang Narkoba dan HIV/AIDS	100%	K3
		Terpenuhinya Dokumen Rumusan Kebijakan Kependudukan	2 Dokumen	DALDUK
		Meningkatnya Koordinasi dengan Perangkat Daerah	2 Kegiatan	DALDUK
		Meningkatnya Pengelolaan data dan Informasi Kependudukan dan KB	5 Dokumen	DALDUK
		Meningkatnya Pemahaman terhadap Informasi Kependudukan dan KB	1 Kegiatan	DALDUK

Sumber : Perjanjian Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Boyolali Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. **7.346.899.000,00** yang selengkapnya sebagaimana dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali Anggaran Perubahan (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali merupakan perwujudan kewajiban Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali (DP2KBP3A) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas / kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan / program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali Tahun 2020 yaitu :

- a. Keluaran (**Output**) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (**outcome**) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2020, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \left(\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2020 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RENSTRA TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	TAHUN 2019				KASI PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Bagi Perempuan Dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	%	21	10	10	14	16	16	100	Baik	Kasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
2 Peningkatan Pemahaman tentang Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Organisasi Wanita	87	10	10	10	15	15	100	Baik	Kasi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
3 Pemenuhan Hak Anak	Desa	159	19	22	25	28	67	240	Sangat Baik	Kasi Pemenuhan Hak Anak
4 Meningkatnya Penanganan Kasus Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	100	100	100	100	100	100	100	Baik	Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak
5 Peningkatan Kapasitas Jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak	%	100	16	26	42	58	58	100	Baik	Kasi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
6 Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	%	75	25	35	45	55	55	100	Baik	Kasi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
7 Meningkatnya Pemahaman Kesetaraan Gender, Perempuan dan Anak	Kegiatan	4	1	1	2	1	1	100	Baik	Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak
8 Meningkatnya Kualitas Tribina	%	21	21	21	21	21			Baik	Kasi Ketahanan Keluarga
9 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Dokumen	18	3	3	3	3	3	100	Baik	Kasi Data dan Pengendalian Penduduk
10 Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Kegiatan	6	1	1	1	1	1	100	Baik	Kasi Data dan Pengendalian Penduduk
11 Meningkatnya Pelayanan KB	%	80	80,95	70,96	71,65	77	71,69	93,50	Baik	Kasi PembinaanKesertaan ber KB
12 Pelayanan KB (Peran PPKBD)	%	100	282	282	282	282	282	100	Baik	Kasi Advokasi dan Penggerakan
13 Capaian Peserta KB MKJP	%	100	55.198	60.300	30.328	100	40.857	31,98		Kasi PembinaanKesertaan ber KB
14 Cakupan Jumlah Kelompok KRR Yang Aktif	%	100	20,48	29,92	40,96	65,63	65,53	100	Baik	Kasi Ketahanan Keluarga
15 Berkembangnya Kelompok PIK Remaja	Kelompok	72	6	7	10	13	13	100	Baik	Kasi Ketahanan Keluarga
16 Cakupan Pemahaman Perempuan dan Remaja tentang Narkoba dan	%	100	100	100	100	100	100	100	Baik	Kasi Ketahanan Keluarga

HIV/AIDS											
17	Terpenuhinya Dokumen Rumusan Kebijakan Kependudukan	Dokumen	10	2	2	2	2	2	100	Baik	Kasi Data dan Pengendalian Penduduk
18	Meningkatnya Koordinasi dengan Perangkat Daerah	Kegiatan	10	2	2	2	2	2	100	Baik	Kasi Advokasi dan Penggerakan
19	Meningkatnya Pengelolaan data dan Informasi Kependudukan dan KB	Dokumen	25	5	5	5	5	5	100	Baik	Kasi Data dan Pengendalian Penduduk
20	Meningkatnya Pemahaman terhadap Informasi Kependudukan dan KB	Kegiatan	5	2	1	1	1	1	100	Baik	Kasi Data dan Pengendalian Penduduk
RATA-RATA CAPAIAN										...	

A. Indikator Kinerja 1. Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Bagi Perempuan dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini dikarenakan, melalui pelatihan ketrampilan dan pembinaan kelompok untuk meningkatkan hasil usaha kelompok UPPKS dan Posdaya masing-masing kelompok yang aktif di kecamatan.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketrampilan dengan memberikan pendampinga dalam meningkatkan kualitas UPPKS dan Posdaya yang aktif dengan mengusahakan tambahan modal usaha.

a. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Dilaksanakan melalui Progam Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha.

Target kinerja 19 kelompok di kecamatan tercapai 19 kelompok atau 100% yang terdiri 19 kelompok UPPKS dan 19 kelompok Posdaya.

Program/ kegiatan secara umum sesuai dan dapat menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik, namun perlu upaya beberapa aktivitas yang lebih focus antara lain meningkatkan kemampuan keluarga dalam kegiatan ekonomi produktif.

B. Indikator 2 : Meningkatkan Pemahaman tentang Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini karena adanya sinergi antara OPD dan organisasi wanita, Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Boyolali sehingga kesadaran untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi perempuan dalam pembangunan semakin tinggi.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Kurangnya SDM diantisipasi dengan mengoptimalkan komunikasi dengan jaringan organisasi perempuan, Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Boyolali.

c. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Dilaksanakan melalui Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan kegiatan utama berupa Pembinaan Organisasi Perempuan.

Dengan bentuk Pembinaan yang diberikan kepada organisasi perempuan terkait materi-materi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman tentang PUG dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.

C. Indikator Kinerja 3 : Meningkatnya Lingkungan Ramah Anak

1) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan Keberhasilan capaian indikator kinerja ini dikarenakan :

- a. Komitmen dari semua pemangku kebijakan dan masyarakat dalam berupaya Pemenuhan Hak Anak
- b. Distribusi Juknis Pengembangan Desa Layak Anak ke Kecamatan dan Desa.
- c. Sosialisasi konsep Desa Layak Anak
- d. Menentukan focus utama kegiatan dalam mewujudkan Desa Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya menyiapkan di masing-masing desa terkait
- e. Menyelenggarakan rapat koordinasi lintas OPD untuk mensosialisasikan Desa Layak Anak

2) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Pembuatan kebijakan/surat edaran yang berisi pedoman penerapan desa layak anak dan penguatan forum anak Kabupaten Boyolali sesuai ketentuan dan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga alokasi anggaran dari Rp. 13.800.000,- terserap sebesar Rp. 13.800.000,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 100%.

- 3) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan Dilaksanakan dengan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dengan kegiatan utama Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.

Dengan bentuk kegiatan secara riil yaitu Deklarasi dan Evaluasi bersama menuju kabupaten layak anak.

Dari target berkembangnya kabupaten menuju desa layak anak di 31 desa/lokasi telah dideklarasikan, namun perlu upaya beberapa aktivitas yang lebih focus pada aspek-aspek yang dievaluasi atau dinilai antara lain terbangunnya komitmen disemua pihak (OPD, Swasta, Masyarakat) untuk menuju kabupaten layak anak.

D. Indikator Kinerja 4 : Meningkatnya Penanganan Kasus Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

- 1) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Boyolali bersifat fluktuatif suatu saat bisa naik dan bisa turun, apabila disandingkan data tahun 2019 berjumlah 31 Kasus dan Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 56 Kasus.

Naiknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan :

- a. Semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.
- b. Semakin berani korban untuk melakukan pengaduan terhadap kasus tindak kekerasan.
- c. Terbentuknya PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) di setiap kecamatan sebagai layanan pengaduan di tingkat kecamatan sehingga apabila terjadi kasus kekerasan dapat diselesaikan di tingkat kecamatan.

- d. Upaya – upaya pencegahan melalui seminar tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di masyarakat maupun di sekolah melalui Forum Anak maupun pembentukan PIK Remaja (Pusat Informasi Konseling).
 - e. Sosialisasi tentang Undang – undang maupun Perda Perlindungan Anak baik melalui media elektronik maupun media cetak serta pada even tertentu seperti Car Free Day dan kampanye Stop kekerasan Perempuan & Anak serta Sosialisasi melalui media Elektronik (Radio) ngobrol bareng dengan Forum Anak.
 - f. Adanya pandemic Covid-19 semakin meningkat kasus kekerasan terhadap anak, karena sistem daring bagi anak Sekolah tidak dipergunakan secara maksimal namun digunakan untuk bermain. Kurangnya pengawasan terhadap anak sehingga banyak terjadi kasus Pelecehan Seksual.
- 2) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- a. memberdayakan kelompok-kelompok sosial masyarakat seperti Karang Taruna, PKK, organisasi keagamaan, Forum Anak.
 - b. melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - c. Sosialisasi baik tatap muka maupun melalui sarana media elektronik atas permintaan masyarakat;
 - d. Advokasi dan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak melalui Tim P2TP2A;
 - e. Melalui event-event tertentu secara kolaborasi melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 3) Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Dilaksanakan dengan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dengan kegiatan utama berupa Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), dan kegiatan riilnya dengan beberapa aktivitas berupa Pelatihan bagi petugas pelayanan pengaduan dengan tujuan setiap petugas mampu melayani

pengaduan sesuai prosedur dan Pendampingan terhadap korban kekerasan baik pendampingan mental maupun pemberian bantuan sembako.

E. Indikator Kinerja 5 : Meningkatnya Kapasitas Jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak

1) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan pedoman penerapan dalam mengkampanyekan gerakan sayang ibu dan bayi yang memadai sesuai dengan ketentuan melalui Evaluasi Kecamatan Sayang ibu dan bayi melalui pengisian kuesioner evaluasi kecamatan sayang ibu dan bayi di 4 Kecamatan.

2) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan advokasi untuk mendapatkan dukungan lintas sektor yang memadai bagi tercapainya target Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi

3) Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Dilaksanakan melalui program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dengan kegiatan utama berupa Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dengan kegiatan riil melakukan kampanye gerakan sayang ibu dan bayi.

Target penilaian dan evaluasi kecamatan rumah sakit sayang ibu dan bayi sebanyak 4 Kecamatan tercapai 4 Kecamatan, atau tercapai sebesar 100%, Program dan kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik.

F. Indikator Kinerja 6 : Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak

1. Cakupan Pelayanan Aduan.

1) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini dikarenakan adanya kebutuhan yang dirasakan oleh petugas pelayanan pengaduan korban kekerasan terhadap pelatihan yang akan meningkatkan kompetensi

pelayanan;

2) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan anggaran difokuskan untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga penggunaan anggaran dari Rp. 2.200.000,- terserap sebesar Rp. 1.200.000,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 55%.

3) Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Dilaksanakan melalui program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan kegiatan utama berupa Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan. Dengan kegiatan riil Fasilitasi berupa Pelatihan, dilaksanakan untuk 35 orang.

G. Indikator Kinerja 8 : Meningkatnya Kualitas Tribina

1) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Kelompok kegiatan perlu dukungan lintas sektor, demi keberlangsungan kegiatan, serta optimalnya jaringan komunikasi yang terintegrasi dengan kelompok kegiatan yang lain. Misalnya BKB HI yang merupakan kelompok BKB yang kegiatannya terintegrasi dengan Posyandu dan Pos PAUD.

2) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Kurangnya kader kelompok kegiatan (poktan) diantisipasi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (kader) melalui Pelatihan dan Orientasi sesuai dengan kelompok kegiatan.

3) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Sampai dengan akhir Tahun 2019 tercapai 132 Desa yang memiliki kelompok BKB, BKR dan BKL atau 42% dari target yang direncanakan 47% Dilaksanakan dengan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan pada kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera, dengan kegiatan riil yang dilakukan dengan penyuluhan dan pembinaan ke kelompok langsung.

H. Indikator Kinerja 9: Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

1) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Pencapaian Cakupan Peserta KB Aktif tahun 2020 disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

- 1) Semakin gencarnya sosialisasi tentang program-program KB, pentingnya mengikuti KB, dan juga pengetahuan tentang alokon-alokon yang aman, baik, dan dapat digunakan oleh masyarakat;
- 2) Kesadaran dari masyarakat dan kesadaran dari Kader KB akan pentingnya program KB;
- 3) Meningkatnya partisipasi warga dalam Safari KB yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Petugas Lapangan KB, Bidan Desa, dan Kader KB. Pada tahun 2020, peningkatan jumlah partisipasi warga masyarakat cukup banyak sehingga beberapa kali pernah menolak karena kondisi kesehatannya secara medis tidak memenuhi syarat untuk dilayani.

2) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Petugas Lapangan/PKB di Boyolali sudah melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah Kecamatannya masing-masing, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan Peserta Aktif (PA) di Kabupaten Boyolali dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Dalam rangka menurunkan tingkat putus pakai kontrasepsi (DO), program unggulan yang dilaksanakan adalah melalui Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan Pelayanan KIE baik yang dilaksanakan di masing-masing daerah kecamatan maupun di DP2KBP3A Kabupaten Boyolali. Kegiatan riilnya dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

I. Indikator Kinerja 10: Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

1) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Keberhasilan pencapaian cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun ini dikarenakan semakin gencarnya mensosialisasikan mengenai dampak dari Pernikahan Usia Dini di kalangan masyarakat. Prosentase PUS yang istrinya dibawah 20 tahun di Kabupaten Boyolali tahun 2020 sebesar 1.03% Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten

Boyolali pada tahun 2020 mengindikasikan adanya keberhasilan meskipun angka prosentasenya turun sebesar 0,31% dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. Meskipun demikian angka ini dapat ditekan dengan angka yang sangat kecil. Selain itu, hal tersebut tidak dipengaruhi oleh pelaksanaan program mengingat selama tahun 2020 ini sudah menjalankan banyak kegiatan dalam rangka menyuarkan penekanan terhadap angka PUS dibawah 20 tahun dan menekan angka pernikahan dini. Kegiatan tersebut juga melibatkan pihak kegita seperti KUA, Fapsedu, Puskesmas, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat lainnya.

2) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Kurangnya sumber daya dilapangan/ PKB diatasi dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat peduli KB dan mengoptimalkan dukungan lintas sektor dan penyampaian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui Mobil Unit Penerangan (Mupen KB).

3) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Dilaksanakan dengan Program Keluarga Berencana melalui kegiatan Pelayanan KIE, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri melalui kegiatan Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB, Program Peningkatan Informasi Kependudukan dan KB melalui kegiatan Fasilitasi Koalisi Penduduk Pembangunan serta Fapsedu dan Koordinasi Pengelolaan Program.

J. Indikator Kinerja 11 : Meningkatnya Pelayanan KB

1) Analisis penyebab keberhasilan

Penyebab keberhasilan dan meningkatkan Penurunan DO (Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi) tahun 2020 yaitu pada angka 11,38% dikarenakan meningkatnya jumlah akseptor KB Baru yang dapat mendukung Peserta Aktif, sehingga angka prosentase Drop Out (DO) dapat diturunkan.

2) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Petugas Lapangan/PKB di Boyolali sudah melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat di wiayah Kecamatannya masing-masing,

sehingga hal tersebut dapat menekan besarnya angka Drop Out (DO) dan meningkatkan Peserta Aktif (PA) di Kabupaten Boyolali dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Dalam rangka menurunkan tingkat putus pakai kontrasepsi (DO), program unggulan yang dilaksanakan adalah melalui Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan Pelayanan KIE baik yang dilaksanakan di masing-masing daerah kecamatan maupun di DP2KBP3A Kabupaten Boyolali.

K. Indikator Kinerja 12 : Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan dan KB

1) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Dukungan lintas sektor, optimalnya jaringan komunikasi dengan kelompok masyarakat peduli KB menjadi factor penting bagi keberhasilan pencapaian target

2) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Kurangnya petugas lapangan diantisipasi dengan memperkuat dukungan lintas sektor dan memperkuat komunikasi antara petugas lapangan dengan kelompok masyarakat peduli KB

3) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Dilaksanakan dengan program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri dengan kegiatan utama berupa kegiatan Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB. Kegiatan riilnya Penjagaan jumlah kader KB/KS dilakukan dengan kesinambungan komunikasi dan pembinaan kegiatan.

M Indikator Kinerja 13: Meningkatnya Capaian Peserta KB MKJP

1) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Peningkatan capaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Boyolali tahun 2020 ini adalah sebesar 1,45% dari tahun

2020 lalu. Keberhasilan ini merupakan keberhasilan penyuluh

keluarga berencana dalam melakukan penyuluhan di masyarakat tentang penggunaan MKJP daripada menggunakan kontrasepsi jenis lain.

2) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang dalam hal ini PKB telah melakukan penyuluhan yang baik, terbukti dari minimnya jumlah PKB tetapi capaian MKJP meningkat dari tahun ke tahun.

3) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan Program penunjang

Peningkatan MKJP ini yaitu Program Keluarga Berencana Kegiatan Pelayanan KIE, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri pada Kegiatan Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB, selain itu juga Program Peningkatan Informasi Kependudukan dan KB pada Kegiatan Fasilitasi Koalisi Penduduk Pembangunan serta Fapsedu.

N. Indikator Kinerja 14: Meningkatnya Cakupan Jumlah Kelompok KRR yang Aktif

1) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Keberhasilan capaian target sampai dengan akhir Tahun 2020 sebesar 60 % dari Target sebesar 60 % atau tercapai 100 % disebabkan semakin tumbuh kesadaran Kelompok–kelompok PIK semakin aktif.

2) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Kurangnya petugas lapangan diatasi dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat peduli KB dan mengoptimalkan dukungan lintas sektor dan penyampaian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui Mobil Unit Penerangan KB (Mupen KB) serta pembinaan secara berkala terhadap kelompok PIK Remaja.

3) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Dilaksanakan melalui Program Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Remaja dan Kelompok sebaya di luar sekolah. Keberhasilan capaian target diantaranya disebabkan karena terselenggaranya pembinaan kelompok PIK KRR sebanyak 40 Kelompok dan Advokasi serta KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

O. Indikator Kinerja 15 : Berkembangnya Kelompok PIK Remaja

1) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Kelompok kegiatan BKB yang aktif, dimana perlunya peningkatan pemahaman tentang arti pentingnya tumbuh kembang anak bagi kader BKB, sehingga sosialisasi terkait tumbuh kembang anak masih perlu ditingkatkan.

2) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan advokasi untuk mendapatkan dukungan lintas sektor yang memadai bagi tercapainya target masyarakat yang sejahtera melalui BKR.

3) Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Dilaksanakan melalui program Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak. Target penilaian dan evaluasi masyarakat peduli Bayi dan Anak tidak tercapai karena tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan diatas, dikarenakan adanya Rasionalisasi Covid-19.

2. Desa dengan Posdaya Aktif

1) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan pencapaian target cakupan kelompok Usaha Ekonomi Produktif dimasyarakat dengan pembinaan ke Kelompok Usaha.

2) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan Ketrampilan untuk usaha peningkatan pendapatan keluarga.

3) Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Dilaksanakan melalui program Pembinaan dan pelatihan Ketrampilan bagi anggota kelompok usaha.

Target penilaian dan evaluasi masyarakat ke 19 Kecamatan dan terealisasi 100%.

P. Indikator Kinerja 16 : Cakupan Pemahaman Perempuan dan Remaja tentang Narkoba dan HIV/AIDS

1) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Peningkatan pemahaman perempuan dan remaja tentang Narkoba dan HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali sebesar 150 orang . Keberhasilan ini merupakan keberhasilan kelompok PIK Remaja dan Forum GENRE dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi

terkait bahaya narkoba dan HIV/AIDS.

2) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Sumberdaya yang dalam hal ini kelompok kegiatan diantaranya kelompok PIK Remaja dan Forum GENRE telah melakukan penyuluhan dengan baik, terbukti dengan menurunnya kenakalan remaja pengguna narkoba.

3) Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Program penunjang penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS ini adalah program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS. Dengan kegiatan riilnya berupa Penyuluhan Remaja yang mandiri, pada kegiatan Operasional, Kelompok kegiatan (POKTAN) yang peduli remaja (PIK Remaja, Forum Genre) selain itu juga Program Kesehatan Remaja (KRR) yang memberikan Advokasi KIE Remaja.

Q. Indikator Kinerja 17 : Terpenuhinya Dokumen Rumusan Kebijakan Kependudukan

a. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan pencapaian cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun ini dikarenakan semakin gencarnya mensosialisasikan mengenai dampak dari pernikahan usia dini dikalangan masyarakat. Prosentase PUS yang istrinya dibawah 20 tahun di Kabupaten Boyolali tahun 2020 sebesar 18,35%. Hal ini menunjukan bahwa pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 mengindikasikan adanya keberhasilan meskipun angka prosentasenya naik sebesar 0,03% dibandingkan dengan tahun 2019 tahun lalu. Meskipun demikian angka ini dapat ditekan dengan angka yang sangat kecil, selain itu hal tersebut tidak dipengaruhi oleh pelaksanaan program mengingat selama tahun 2020 ini sudah menjalankan banyak kegiatan dalam rangka menyuarakan penekanan terhadap angka PUS dibawah 20 tahun dan menekan angka pernikahan dini. Kegiatan tersebut juga melibatkan pihak ketiga seperti KUA, Fapsedu, Puskesmas, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat lainnya.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Kurangnya sumber daya di lapangan/PKB diatasi dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat peduli KB dan mengoptimalkan dukungan lintas sektor dan penyampaian Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) melalui mobil unit penerangan.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan dilaksanakan dengan Program Keluarga Berencana melalui kegiatan pelayanan KIE. Kegiatan riil berupa fasilitasi koalisi penduduk, pembangunan serta fapsedu dan koordinasi dengan pengelola program.

R. Indikator Kinerja 18 : Meningkatnya Koordinasi dengan Perangkat Daerah

a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Dukungan lintas sektor, optimalnya jaringan komunikasi dengan kelompok masyarakat peduli KB menjadi faktor penting bagi keberhasilan pencapaian target.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Kurangnya petugas lapangan diantisipasi dengan memperkuat dukungan lintas sektor dan memperkuat komunikasi antara petugas lapangan dengan kelompok masyarakat peduli KB

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
Dilaksanakan dengan program Peningkatan informasi Kependudukan dan KB melalui kegiatan Analisa Data Pengendalian Penduduk dengan capaian sebanyak 1 Dokumen dari target 1 Dokumen atau 100%.

S. Indikator Kinerja 19 : Meningkatnya Pelayanan KB (Peran PPKBD)

1) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Penghitungan Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) ini dilakukan dengan metode perhitungan sederhana berdasarkan jumlah penduduk kabupaten boyolali. Metode penduduk pertengahan

diambil berdasarkan jumlah penduduk awal ditambah jumlah penduduk akhir lalu dibagi dua. Hal ini dilakukan karena perhitungan Angka Kelahiran Menurut Umur/ *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) belum dapat dilakukan, mengingat data dari masing-masing wilayah Kecamatan masih mengolah data kelahiran yang dibutuhkan dalam perhitungan ASFR ini.

2) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dengan keterbatasan sumber daya di lapangan/PKB ini, maka perhitungan ASFR yang diperlukan dalam penentuan TFR menjadi sedikit terlambat.

3) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Program yang dilaksanakan dalam penekanan angka TFR Kabupaten Boyolali ini melalui berbagai Program, yakni :Program Keluarga Berencana, melalui kegiatan Pelayanan KIE; Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri, melalui kegiatan Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB dan Peningkatan Kapasitas Kader dan Kelompok Masyarakat Peduli KB; Program Peningkatan Informasi Kependudukan dan KB, melalui kegiatan Koordinasi Pengendalian Penduduk, Koordinasi Pengelolaan Program, Analisa Data Pengendalian Penduduk, Fasilitasi Koalisi Penduduk Pembangunan serta Fapsedu, dan Pengelolaan Data dan Informasi Program KB. Kegiatan riilnya memberikan pelatihan teknis kepada kelompok PPKBD.

T. Indikator Kinerja 20 : Meningkatnya Pemahaman Terhadap Informasi Kependudukan dan KB

1) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Meningkatnya angka Unmetneed di Kabupaten Boyolali tahun 2020 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan masyarakat yang Ingin Anak Ditunda dan Tidak Ingin Anak Lagi. Hal ini dapat disikapi dengan cara lebih mengintensifkan penyuluhan di lapangan, sehingga di tahun mendatang angka Unmetneed dapat di tekan sesuai target capaian.

2) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Petugas Lapangan/PKB di Boyolali saat ini sampai dengan 2020 ada 33 PKB dengan ratio 1:12 (1 (satu) PKB berbanding 12 Desa), sehingga kurangnya petugas lapangan/ PKB menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan capaian kinerja salah satunya yaitu Unmetneed.

- 3) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Penurunan angka Unmetneed di Kabupaten Boyolali dilakukan dengan Program Keluarga Berencana Kegiatan Pelayanan KIE, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri pada Kegiatan Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB, selain itu juga Program Peningkatan Informasi Kependudukan dan KB pada Kegiatan Fasilitasi Koalisi Penduduk Pembangunan serta Fapsedu.

Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaan dari APBD Tahun 2020 berjumlah Rp. 10.714.526.000,00 terealisasi Rp. 7.507.855.446,00 dengan penyerapan sebesar 91.41%.

Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali Tahun 2020 selengkapnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 8 Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Koordinator
1	Meningkatnya peran dan kesetaraan gender .	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.				

		Kegiatan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A).	16.750.000	12.257.500	73.17	Bidang PP,PA
		Kegiatan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	11.700.000	10.500.000	89.74	Bidang PP,PA
		Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	0,00	0,00	0,00	Bidang PP,PA
2	Meningkatnya lingkungan ramah anak	Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan				
		Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	0,00	0,00	0,00	Bidang PP,PA
3.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Fasilitasi upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan	2.000.000	2.000.000	100	Bidang PP,PA
4..	Meningkatnya kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan				
		Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	0,00	0,00	0,00	Bidang PP,PA
5.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program KB	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	1.000.000	1.000.000	100	Bidang PP,PA
		Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	2.500.000	2.500.000	100	Bidang PP,PA
Jumlah			33.950.000	28.257.500	83.23	
6.	Meningkatnya kesertaan KB	Program Keluarga Berencana				
		Pelayanan KIE	3.102.055.000	1.738.941.300	56.05	Bidang KB
		Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	4.500.000	3.000.000	66.66	Bidang KB
		Pembinaan Keluarga Berencana	1.782.356.000	893.391.666	50.12	Bidang KB

		Pengadaan sarana mobilitas tim KB Keliling	1.133.000.000	619.413.000	54.67	Bidang KB
		Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	0,00	Bidang KB
		Program Pelayanan Kontrasepsi				
		Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	33.750.000	33.750.000	100	Bidang KB
Jumlah			6.055.661.000	3.288.495.966	87.40	
7.	Tercapainya Kedewasaan Usia Perkawinan	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	0,00	0,00	0,00	Bidang K3
		Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri				
		Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB	112.800.000	112.400.000	89.10	Bidang K3
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader dan kelompok Masyarakat peduli KB	0,00	0,00	0,00	Bidang K3
		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR				
		Fasilitasi Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	1.500.000	1.500.000	100	Bidang K3
		Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS				
		Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS	0,00	0,00	0,00	Bidang K3
8.	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Program pengembangan bahan informasi tentang tumbuh kembang anak				
		Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	0,00	0,00	0,00	Bidang K3

		anak				
		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan				
		Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	538.520.000	196.284.000	36.44	Bidang K3
Jumlah			552.820.000	310.356.000	56.14	
9.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai	Program Peningkatan informasi kependudukan dan KB				
		Koordinasi Pengendalian Penduduk	0,00	0,00	0,00	Bidang Dalduk
		Koordinasi Pengelolaan Program	0,00	0,00	0,00	Bidang Dalduk
		Analisa Data Pengendalian Penduduk	0,00	0,00	0,00	Bidang Dalduk
		Fasilitasi kualisi Penduduk Pembangunan serta Fasedu	0.00	0,00	0,00	Bidang Dalduk
		Pengelolaan data dan informasi program KB	40.950.000	40.950.000	100	Bidang Dalduk
Jumlah			40.950.000	40.950.000	100	

BAB IV

PENUTUP

Simpulan

Pada tahun 2020, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali Dengan satu (1) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali Tahun 2020, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian Kinerja sebagai berikut :

- 1) Capaian lebih dari 100 % (Sangat Baik) : 4 (tujuh) indikator
- 2) Capaian 75% sampai 100% (Baik) : 1 (satu) indikator
- 3) Capaian 55% sampai 74 % (Cukup) : 2 (dua) indikator
- 4) Capaian kurang dari 54 % (Kurang) : 13 (tiga belas) indikat

Pembiayaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2020 sebesar Rp. 10.714.526.000,00 terealisasi Rp. 7.507.855.446,00 dengan penyerapan sebesar 70.07%.

Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali, fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali sebagai pengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dalam semua urusan pemerintahan daerah secara berkala;

- b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua OPD secara berkala;
- c. Meningkatkan mobilitas dan kapasitas tenaga PKB/PLKB dan PPLKB dalam pembinaan dan penyuluhan KB;
- d. Permohonan formasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB);
- e. Menerapkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Kekerasan dalam rumah tangga untuk memberikan efek jera dari pelaku tindak kekerasan;
- f. Adanya MOU antara Rumah Sakit dengan dinas terkait dalam memberikan pelayanan medis/visum dokter;
- g. Perlu dukungan dana untuk pendampingan korban kekerasan mulai dari pelayanan medis/visum, hukum, konseling, psikologis dan bantuan dana bagi korban;
- h. Meningkatkan kualitas hasil perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan (aplikatif) dan dapat mengurangi kesalahan/ keraguan dalam pelaksanaannya yang berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerjaan;
- i. Menggunakan pemecahan solusi dalam dokumen ini sebagai strategi mempertahankan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara rutin sebagai alat kendali dan umpan balik pencapaian target kinerja.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Melakukan re-orientasi terhadap program/ kegiatan yang kurang tepat sasaran;
- b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan;

- d. Memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- e. Memperkuat komitmen dari seluruh Unit Kerja/Bagian/Bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

KEPALA DP2KBP3A
KABUPATEN BOYOLALI



Dra.WIWIS TRISIWI HANDAYANI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660324 199202 2 002